LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebagaimana diharapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 merupakan dokumen pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada hasil realisasi kinerja perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka kesempurnaan laporan ini. Harapan kami kiranya laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Muara Sabak, Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DEDDY ARMADI, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750615 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN 4

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 6

1.4. STRUKTUR DAN ORGANISASI 11

1.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN 13

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN 15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16

2.1 RENCANA STRATEGIS 16

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

3.1 CAPAIAN KINERJA 23

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 25

3.3 REALISASI ANGGARAN 41

BAB IV PENUTUP 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran negara sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun LKjIP tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dibidang kerjanya dan atas realisasi anggaran selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang melaporkan hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang lalu sebagai gambaran untuk beberapa tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 melaporkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program serta capaian kinerja yang didukung semua indikator kinerja utama dan berdasarkan Pengukuran Kinerja (PK). Komponen ini mengacu pada

RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan implementasi dari Program Kerja OPD yang juga merupakan Program Kerja dari Bupati Tanjung Jabung Timur yang menjadi tantangan satuan kerja yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan langkah – langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan Kualitas SDM Aparatur dan Sistem Pelayaanan Perpustakaan yang berbasis Komputerisasi yang efektif.

Selama ini Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya pelayanan perpustakaan serta layanan kearsipan belum menerapkan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik secara Optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya keluhan masyarakat, mahasiswa dan pelajar tentang prosedur dan mekanisme kerja pemberian pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kurang solid, kurang Informatif dan terbatasnya fasilitas, sarana serta prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin pelayanan prima.

Untuk mewujudkan sasaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tanjung Jabung Timur periode 2021 – 2026 (RPJMD) berupa terciptanya Tata Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab maka ditetapkan arah kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan prima dengan prinsip : Cepat, Murah, Mudah, Transparan, Pasti dan memuaskan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sinkronisasi dari Perencanaan Strategis yang merupakan suatu rangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional Umum dan Pegawai Harian Tidak Tetap dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam hal ini, dituntut mampu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang

potensial, berdedikasi dan menyadari misinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data serta mampu memberikan pelayanan yang prima dan mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan pimpinan sehingga Visi dan Misi **"MERAKYAT (Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur)"** untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat tercapai.

Sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara terus menerus akan melakukan perubahan-perubahan untuk pencapaian kearah perbaikan, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
   a. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
   b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan *Pelaporan* Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
   c. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tahun 2003.
   d. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

f. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu

4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

1) **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

1.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

1.3 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah kabupaten/Kota

1.4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

1.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

1.6 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2) **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

2.1 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

3. **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

1) **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**

1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

1.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

1.3 Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan Kabupaten / Kota

2) **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**

2.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

3) **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**

3.1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

3.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Produk dari program dan kegiatan tersebut di atas berupa Laporan pelaksanaan kegiatan, Laporan peningkatan minat baca masyarakat dan Peningkatan kualitas penyelenggaran kearsipan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan perpustakaan dan kearsipan
2. Penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan kepustakaan dan kearsipan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan
4. Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kepustakaan dan kearsipan
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perpustakaan dan kearsipan yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
c. Pengelolaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
f. Pengelolaan urusan umum;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
h. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
i. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan; dan
j. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi :

a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;
d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
i. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
j. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
k. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bidang pembinaan, pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembanganperpustakaan dan pembudayaan kegemaran budaya membaca.

Bidang pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangantenaga perpustakaan; dan
c. Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca;

Bidang Deposit, pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan.

Bidang Deposit, pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content), dan pelaksanaan kajian kebutuhan pemustakaan;
b. Pelaksanaan pengolahan bahan perpustakaan meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;
c. Pelaksanaan konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan;
d. Pelaksanaan layanan dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, kerjasama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;

e. Pelaksanaan alih media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital; dan
f. Pelaksanaan otomasi perpustakaan meliputi pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, serta pengelolaan website dan jaringan perpustakaan.

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan layanan pengelolaan kearsipan.

Bidang Kearsipan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan;
b. Pelaksanaan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah, lembaga kearsipan daerah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, masyarakat dan desa/kelurahan; dan
c. Pelaksanaan pengolahan arsip melalui pengelolaan arsip dinamis, akuisisi danpengolahan arsip statis, preservasi arsip serta layanan pemanfaatan arsip

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Fungsional Perencana.
3. Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, terdiri dari :
   a. Fungsional Pustakawan.
4. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri dari:
   a. Fungsional Pustakawan .
5. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
   a. Fungsional Arsiparis.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

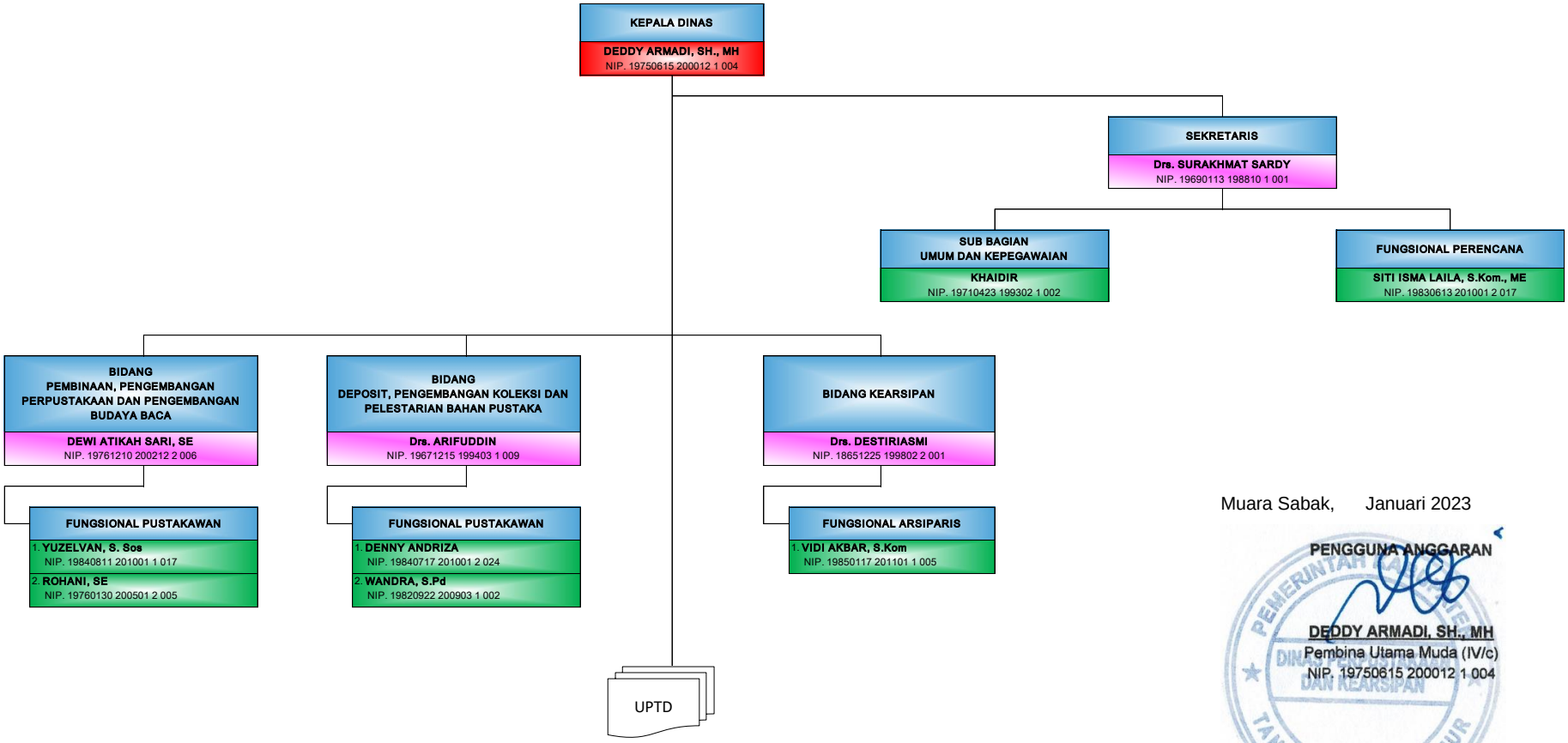

Muara Sabak, Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN

DEDDY ARMADI, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750615 200012 1 004

E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Susunan kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat golongkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi :

Gambar 1.2
Susunan Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan, Tingkat Pendidikan dan Esselon

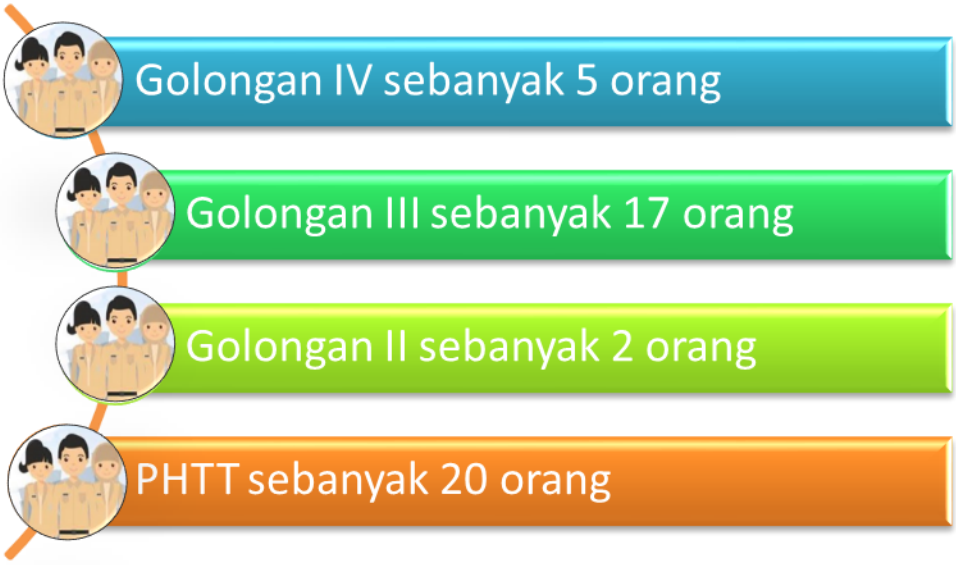

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikelompokkan menjadi :

Gambar 1.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur

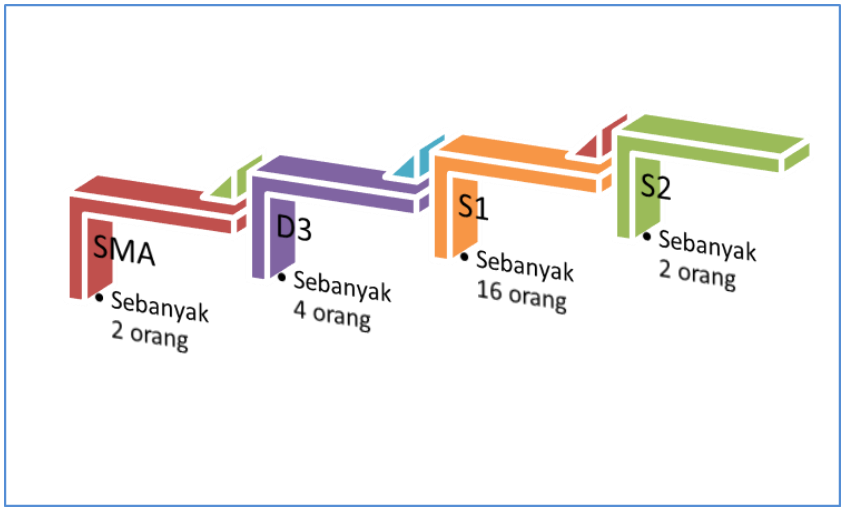

Menurut Esselon, pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikelompokkan menjadi :

Gambar 1.4

Esselon Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur

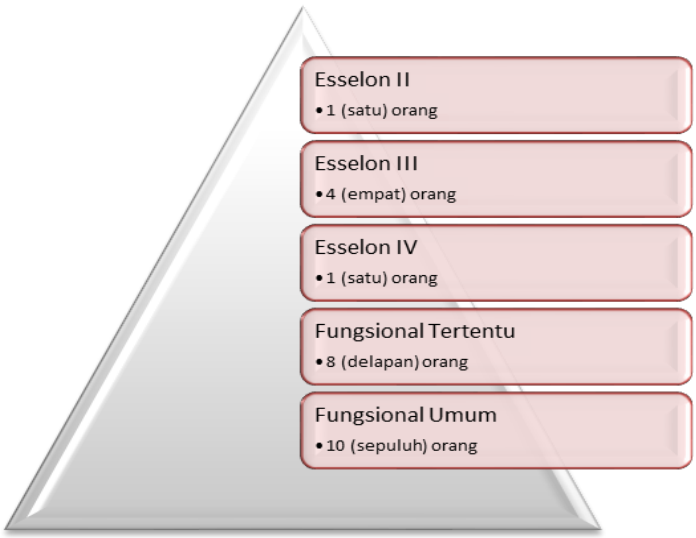

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2022 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang merupakan komitmen Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui pembandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai Latar Belakang, Program dan Kegiatan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu akan diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kinerja lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja dinas, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

a) Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya serta infra struktur. Sejalan dengan itu, maka visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 yaitu **"MERAKYAT".** Yaitu **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.**

b) Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026

Sebagai upaya pencapaian visi, ditetapkan 4 (Empat) misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026 sebagai berikut :

a. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
b. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing;
c. Meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari;
d. Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-4, yaitu "**Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis**".

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Sasaran dan Program tahun 2021 - 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Dan Program Tahun 2021-2026

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	88,35	88,45	88,55	88,65	88,75	89
		Predikat AKIP			2	Predikat AKIP	B	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan Sesuai SAP			3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi melalui literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19	21,5	25	28	30	35
		Tingkat Kegemaran Membaca			2	Tingkat Kegemaran Membaca	NA	61	62	63	64	65
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	1	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	C	C	C	B	B	B

2.1.3. Strategi, Program, dan Kegiatan

Selanjutnya berikut ini disajikan susunan Program dan Kegiatan yang diambil untuk mencapai masing-masing Sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan.

a. Program dan Kegiatan

Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi kegiatan mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program tersebut adalah meningkatkan minat baca masyarakat dengan gemar membaca melalui literasi buku serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun program tersebut sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
3. PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN

b. Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu alat ukur dalam kinerja perangkat daerah periode 5 tahun kedepan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Adapun sasaran srategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Program

No	Sasaran Strategis
1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Formula	Target					
								2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	Survey	88,35	88,45	88,55	88,65	88,75	89
		Predikat AKIP			2	Predikat AKIP	Penilaian Inspektorat	B	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan Sesuai SAP			3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi melalui literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	(a + b + c + d + e + f + g)/ Jmlh Penduduk Keterangan : a. Pemerataan Layanan Perpustakaan/Jumlah Perpustakaan) / Jumlah Populasi Penduduk b. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan / 2xJumlah Populasi Penduduk c. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk d. Tingkat Kunjungan Masyarakat / Jumlah Populasi Penduduk e. Perpustakaan berStandar Nasional Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk f. Keterlibatan Masyarakat dalam KIE / Jumlah Populasi Penduduk g. Anggota Perpustakaan / Jumlah Populasi Penduduk	19	21,5	25	28	30	35
		Tingkat Kegemaran Membaca			2	Tingkat Kegemaran Membaca	TGM = (FB+DM+JBB)/3 Keterangan : FB = Frekuensi Membaca DM = Durasi Membaca JBB = Jumlah Bahan Bacaan	NA	61	62	63	64	65
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	1	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	Penilaian pengawasan dari dinas perpustakaan dan arsip provinsi	C	C	C	B	B	B

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program.

Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	*2*		*3*	*4*
	Sasaran Strategis			
1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	88,45
		2	Predikat AKIP	B
		3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai
2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	21,5
		2	Tingkat Kegemaran Membaca	61
3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	1	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	C
	Sasaran Program			
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1	Indeks Pelayanan Instansi (Skor)	88,45
		2	Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP (Persen)	100
		3	Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan	Tepat waktu
2	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dan minat baca	1	Peningkatan Perpustakaan yang berstandar (Persen)	20
3	Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat	1	Peningkatan Jumlah Pengunjung (Persen)	2
4	Terciptanya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	1	Persentase pengelolaan arsip secara baku (Persen)	23,26
	Sasaran Kegiatan			
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
		2	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100
2	Tercapainya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	1	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100
		2	Persentase Penyelesaian Adminitrasi Umum Daerah	100
		3	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
		4	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100
		5	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
3	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dan minat baca	1	Jumlah Perpustakaan yang berstandar	1
4	Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat	1	Jumlah pengunjung perpustakaan / Tahun (Orang)	11750
		2	Persentase Kegiatan pembudayaan gemar membaca (persen)	100
5	Terciptanya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	1	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah	100
		2	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip statis	100
		3	Persentase pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

Dari hasil pengumpulan data kinerja yang ada, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategorisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	*Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja*
91 ≤ 100	*Sangat Baik*
76 ≤ 90	*Tinggi*
66 ≤ 75	*Sedang*
51 ≤ 65	*Rendah*
≤ 50	*Sangat Rendah*

Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 3 (tiga) sasaran program dan 5 (lima) sasaran kegiatan.

Pengukuran target kinerja dari setiap sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Outcome Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Th. 2022	Realisasi		Capaian Th. 2022
					Th. 2021	Th. 2022	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/4)*100*
	Sasaran Strategis						
1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	88,45	88,31	88,43	99,98
		2	Predikat AKIP	B	B	B	B
		3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat	1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	21,5	12,88	10,12	47,07
		2	Tingkat Kegemaran Membaca	61	NA	63,23	100,00
4	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten	1	Nilai Pengawasan Arsip Provinsi Jambi	C	NA	CC	CC

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian *outcome* tahun 2022 sebesar 82,35%. Dibandingkan tahun sebelumnya bahwa capaian *outcome* pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5% dari rata-rata capaian *outcome* tahun 2021 sebesar 89,30%. Dari seluruh target sasaran, terdapat salah satu indikator yang hasil capaiannya menurun dari tahun sebelumnya yaitu indikator Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang masih terkendala dalam pelaksanaan kegiatannya khususnya kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat umum.

Secara umum untuk pencapaian rata – rata kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategorisasi **Tinggi** dengan nilai rata-rata mencapai **82,35**.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas perpustakaan dan kearsipan dalam melaksanakan kinerjanya lebih bersifat sosial dan pelayanan pendidikan. Dengan membidangi 2 urusan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, Dinas perpustakaan dan kearsipan harus bekerja keras demi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan tabel 3.2 capaian kinerja masih belum berjalan secara optimal hal ini terlihat masih adanya indikator yang tidak tercapai sesuai target, salah satunya yaitu indikator Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan nilai pengawasan arsip daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyadari bahwa dalam pencapaian kinerja dengan indikator tersebut masih sulit untuk tercapai melihat beberapa faktor yang menjadi hambatan.

Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan alat ukur terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam perhitungan IPLM tersebut ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

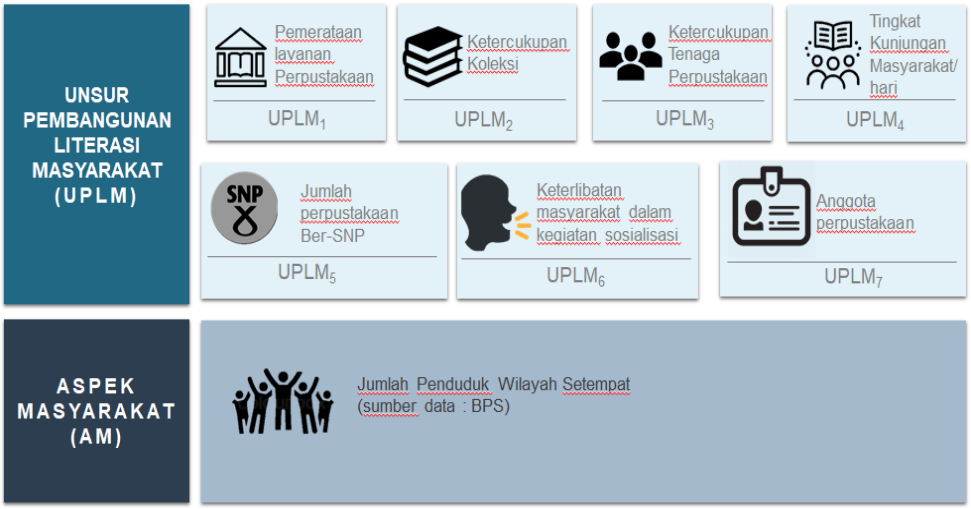

Dari unsur-unsur tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah tahun 2022 masih terkendala oleh beberapa unsur seperti : permasalahan koleksi bahan perpustakaan, Jumlah pemustaka, tingkat kunjungan masyarakat yang masih rendah, Jumlah perpustakaan yang ber-SNP serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa indikator kinerja *output* kegiatan tahun anggaran 2022 sebagaimana terdapat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Output Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian
			Th. 2022	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = (6/4)*100*
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100
		Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	100	100
2	Tercapainya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100
		Persentase Penyelesaian Adminitrasi Umum Daerah	100	100	100	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dan minat baca	Jumlah Perpustakaan yang berstandar	1	1	1	100
4	Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan / Tahun (Orang)	11750	6720	7927	67,46
		Persentase Kegiatan pembudayaan gemar membaca (persen)	100	100	100	100
5	Terciptanya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengelolaan arsip dinamis daerah	100	100	100	100
		Persentase penyelesaian pengelolaan arsip statis	100	100	100	100
		Persentase pelaksanaan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	100	100	100	100
Rata - rata capaian kinerja kegiatan			**97,50**			
JUMLAH PAGU ANGGARAN			**Rp**			**4.035.110.338,0**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pada perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dilakukan pengukuran melalui evaluasi dan analisis kinerja serta sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 guna

mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk menilai capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)
2. Predikat AKIP
3. Laporan Keuangan Sesuai SAP

Uraian capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)

   Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

   Dalam perhitungan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu dengan melakukan survei terhadap Kepuasaan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat adalah alat ukur yang secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik Indeks pelayanan

instansi ini lebih terhadap pelayanan umum kepegawaian serta pelayanan pemerintah terhadap masyarakat umum dalam meningkatkan kebutuhannnya.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 mencapai 88,43 atau mengalami kenaikan 0,08% dari capaian kinerja tahun 2021 yaitu 88,35. Dalam kenaikan pencapaian tersebut didukung oleh adanya usaha kerja keras dalam memberikan pelayanan kepada instasi pemerintah maupun masyarakat umum serta kebijakan yang tepat sasaran. Tetapi meski adanya kenaikan dari tahun sebelumnya tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tetap harus meningkatkan sistem pelayanan yang optimal kepada instasi pemerintah maupun masyarakat umum yang membutuhkan karena hal ini sifatnya pada pelayanan publik.

2. Predikat AKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

AKIP merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sedangkan sasaran dari *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Laporan Keuangan Sesuai SAP

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- Laporan Realisasi APBD (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (komite standar akuntasi pemerintah pusat dan daerah).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan kinerja keuangan selama tahun berjalan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan lancar.

Sasaran Strategis 2

Peningkatan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat

Pengertian literasi secara bahasa yaitu belajar, sedangkan secara umum literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam

membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dan tujuan dari literasi itu sendiri yaitu :

1) Menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik.
2) Menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat.
3) Meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat.
4) Meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan.
5) Membuat seseorang bias berfikir kritis.
6) Memperkuat nilai kepribadian.

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Tingkat Literasi masyarakat suatu bangsa memiliki hubungan yang vertikal terhadap kualitas suatu bangsa. Tingginya minat membaca seseorang berpengaruh terhadap wawasan, mental dan prilaku seseorang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dengan tingkat Literasi yang masih rendah walaupun sudah 70 tahun sejak Indonesia menjadi negara merdeka. Ketika keadaan melek baca menjadi sebuah budaya di Indonesia maka bukanlah mustahil untuk menjadi bangsa yang tidak hanya berhasil berkembang, tetapi juga sebagai bangsa yang maju. Maka dari itu sesuai dengan standarisasi Perpustakaan Nasional RI guna mengukur tingkat literasi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi suatu budaya baca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan baik dari aspek sebaran

perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan **Permendagri No. 18 Tahun 2020** Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.13 Tahun 2019 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah menjadi salah satu unsur Indikator Kinerja Kunci (IKK) di bidang perpustakaan. Perpustakaan Nasional RI mencantumkan dalam rencana strategis periode tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat". Guna mendukung sasaran strategis nasional, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kajian IPLM dengan bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi guna mewujudkan Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 18 tahun 2020 pengukuran Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggunakan beberapa unsur terkait diantaranya :

1) Pemerataan layanan Perpustakaan
2) Ketercukupan Koleksi
3) Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
4) Tingkat Kunjungan Masyarakat
5) Jumlah perpustakaan Ber-SNP
6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi
7) Anggota perpustakaan
8) Jumlah penduduk wilayah setempat

Adapun formulasi perhitungan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Perhitungan} = \sum \frac{UPLM_i}{AM} \; x \; 100$$

1) Pemerataan Layanan Perpustakaan

   Dihitung dengan formulasi = $\frac{Jumlah\ total\ perpustakaan}{Jumlah\ penduduk}$

2) Ketercukupan Koleksi

   Dihitung dengan formulasi = $\frac{Jumlah\ koleksi\ perpustakaan}{Jumlah\ penduduk}$

3) Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Dihitung dengan formulasi = $\frac{Jumlah\ tenaga\ perpustakaan}{Jumlah\ penduduk}$

4) Tingkat Kunjungan Masyarakat

Dihitung dengan formulasi = $\frac{Jumlah\ kunjungan\ masyarakat\ perHari}{Jumlah\ penduduk}$

5) Jumlah perpustakaan Ber-SNP

Dihitung dengan formulasi :

= $\frac{Jumlah\ perpustakaan\ yang\ telah\ memiliki\ SNP\ disuatu\ wilayah}{Jumlah\ penduduk}$

6) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi

Dihitung dengan formulasi :

= $\frac{Jumlah\ masyarakat\ terlibat\ dalam\ kegiatan\ sosialisasi\ /\ promosi\ per\ tahun}{Jumlah\ penduduk}$

7) Anggota perpustakaan

Dihitung dengan formulasi = $\frac{Jumlah\ Anggota\ Perpustakaan}{Jumlah\ penduduk}$

Kriteria Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	
16,11 - 59,91	
11,82 - 16,10	
6,5 - 11,81	
1,82 - 6,49	

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan bagian dari ***upaya formulasi kebijakan, serta pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia*** sehingga dibutuhkan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang kondisi semua jenis perpustakaan pada aspek-aspek yang berdasar pada Standar Nasional Perpustakaan. Untuk mendukung program pemerintah pusat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi telah melakukan pendataan secara multiyear dalam perolehan IPLM Kabupaten Tanjung Jabung

Timur. Adapun nilai perolehan dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

No	Unsur	Skor
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,37
2	Ketercukupan koleksi	19,02
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0,58
4	Tingkat Kunjungan masyarakat	6,43
5	Jumlah Perpustakaan Ber-SNP	34,05
6	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi	0,03
7	Anggota Perpustakaan	10,35
	Skor Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	**10,12**

Untuk tahun 2022 Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 10,12 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 12,68. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa unsur yang tidak tercapai sesuai target tahun 2022, diantara unsur tersebut diantaranya :

1. Jumlah koleksi bahan perpustakaan,

   Jumlah koleksi bahan pustaka daerah yang terdapat apabila dilihat kondisi pertahun masih tergolong minim. Pengadaan koleksi bahan pustaka di Perpusatakaan Daerah dari tahun ke tahun belum dapat menambah koleksi bahan pustaka hal ini disebabkan karena pagu anggaran yang kurang memadai untuk pengadaan koleksi bahan pustaka. Untuk pengadaan koleksi bahan pustaka dana yang dibutuhkan minimal 200 juta untuk setiap tahun nya. Dengan keterbatasan pagu anggaran tersebut maka pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dapat menambah koleksi bahan pustaka.

   Diharapkan pada tahun 2023 kedepan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merangkul lembaga-lembaga/ perusahaan swasta dalam bantuan koleksi bahan pustaka guna meningkatan minat baca masyarakat.

2. Jumlah pemustaka,

   Masih minimnya jumlah tenaga pemustaka baik di perpustakaan daerah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, maupun perpustakaan perguruan tinggi.

   Untuk mengatasi minimnya jumlah pemustaka maka ditahun mendatang Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi tenaga pemustaka, selain menambah tenaga pustaka diharapkan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat meningkatkan kualitas pustakawan – pustakawan daerah dan pustakawan-pustakawan lainnya. Hal ini tak lepas dari dukungan anggaran kegiatan yang diperoleh tahun mendatang.

3. Tingkat kunjungan masyarakat yang masih rendah,

   Kondisi ini masih minim karena koleksi bahan pustaka yang tersedia dalam layanan perpustakaan masih koleksi lama sehingga minat kunjungan terhadap perpustakaan daerah minim. Selain itu armada untuk mencapai perpustakaan daerah untuk masyarakat yang tinggal jauh masih sulit.

   Melihat situasi tersebut diharapkan kedepan perpustakaan daerah dapat membuat inovasi layanan dengan membangun layanan perpustakaan digital yang bekerja sama dengan DISKOMINFO dalam dukungan layanan jaringan internet pada masyarakat umum.

4. Jumlah perpustakaan yang ber-SNP,

   Untuk mencapai perpustakaan yang ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan) ada beberapa tahapan yang harus diperoleh oleh salah satu perpustakaan. Sesuai dengan Juknis perpustakaan, untuk memperoleh perpustakaan yang ber-SNP maka perpustakaan tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a) Standar koleksi perpustakaan
   b) Standar sarana dan prasarana perpustakaan
   c) Standar pelayanan perpustakaan
   d) Standar tenaga perpustakaan
   e) Standar penyelenggaraan perpustakaan

f) Standar pengelolaan perpustakaan

5. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial belum terlaksana.
6. Selain itu pembanding dari jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun bertambah.

Indikator Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru berjalan selama 2 tahun berjalan dari tahun 2021 – 2022. Adapun tingkat perkembangan dari tahun tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Tingkat Perkembangan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2022

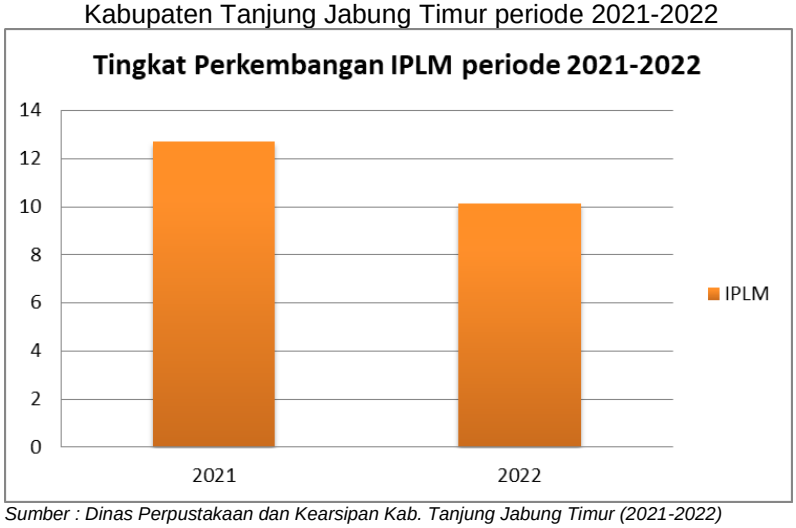

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur (2021-2022)

Pada tahun 2022 Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada diurutan paling rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Adapun diagram perbandingan IPLM tingkat kabupaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Perbandingan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Tingkat Kab/Kota Provinsi Jambi 2022

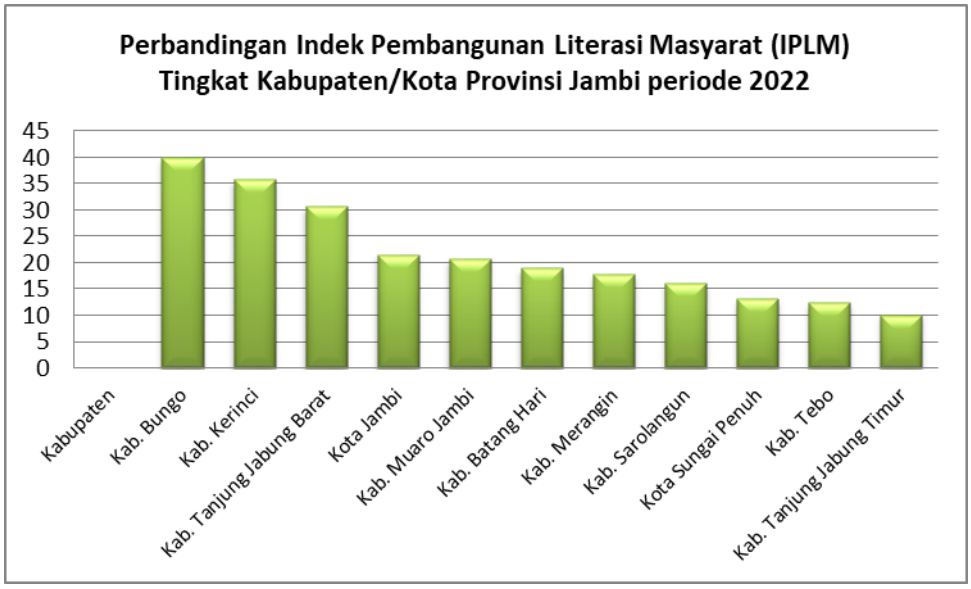

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi (2022)

2. Tingkat Kegemaran membaca (TGM)

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca. Kegemaran membaca masyarakat adalah suatu kondisi perilaku kolektif masyarakat berupa kebiasaan atau kesukaan dalam memperoleh sumber-sumber informasi dan pengetahuan sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, dilaksanakan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Nilai kegemaran membaca masyarakat yang di peroleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 63,23 dengan jumlah responden sebanyak 50 responden dari 5 kecamatan yaitu kecamatan geragai, kecamatan dendang, kecamatan kuala jambi, kecamatan nipah panjang, kecamatan muara

sabak barat. Adapun rincian perhitungan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nilai TGM	Kategori
1	Nipah Panjang	59,75	Sedang
2	Dendang	67,13	Tinggi
3	Muara Sabak Barat	64,88	Tinggi
4	Kuala Jambi	61,13	Tinggi
5	Geragai	63,25	Tinggi

Sasaran Strategis 3

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya memperkokoh dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencapai cita-cita nasional melalui penyelenggaraan kearsipan nasional yang bertujuan untuk :

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;

3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganan;
4. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan masih banyak di temui permasalahan-permasalahan seperti diantaranya :

1. Pembinaan kearsipan yang sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kesadaran bahwa penyelenggaraan kearsipan yang menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik dan pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini penyelenggaraan kearsipan belum sepernuhnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kroteria (NSPK) kearsiapan.
2. Pengelolaan Arsip, masih belum optimalnya perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku sehingga perlu kerja keras dibidang kearsipan menuju pengelolaan arsip berbasis digital.
3. Pengembangan sumberdaya manusia kearsipan yang unggul dibidang kearsipan masih minim.
4. Prasarana dan sarana kearsipan dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi kearsipan / arsip sejarah yang belum didukung

sebagai alat bukti yang sah arsip daerah yang menjadi jati diri daerah belum tersedia.

Dari permasalahan di atas tersebut, selama tahun berjalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di bidang kearsipan kinerja yang menjadi fokus sasaran sesuai dengan RPJMD daerah adalah pembinaan terhadap perangkat daerah untuk dapat menerapkan pengelola arsip secara baku.
Pengelolan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang menjadi alat bukti yang sah/ arsip daerah terjamin keamanannya. Karena nilai guna arsip suatu daerah dapat digunakan sebagai bahan jati diri/ identitas daerah untuk kepentingan diplomasi kebudayaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih paham sejarah bangsa, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air.

Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undanganan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pada tahun 2022 kegiatan pengelolaan kearsipan mengalami kenaikan kinerja. Tahun 2019-2021 jumlah perangkat daerah yang sudah mengelola arsip secara baku sebanyak 10 perangkat daerah atau

mencapai 23,26% dari jumlah OPD Kabupaten dan di tahun 2022 jumlah perangkat daerah bertambah sebanyak 10 perangkat daerah, sehingga total perangkat daerah yang sudah menerapkan arsip secara baku dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 20 perangkat daerah atau mencapai 47%.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

BELANJA DAERAH SEBELUM PERUBAHAN	**Rp.**	**3.720.759.175,-**
BELANJA DAERAH SETELAH PERUBAHAN	**Rp.**	**4.035.110.338,-**
Rincian Anggaran 2022 :		
Belanja Operasi	**Rp.**	**3.821.268.928,-**
Belanja Pegawai	Rp.	2.667.030.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.154.238.928,-
Belanja Modal	**Rp.**	**213.841.410,-**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	94.841.410,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	119.000.000,-

Selama tahun berjalan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur capaian anggaran mencapai 95,86% atau sebesar Rp. 3.868.189.637,-. Dengan rinciannya sebagai berikut :

URAIAN	PAGU		Penyerapan
	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Belanja Daerah	**4.035.110.338**	**3.868.189.637**	**95,86**
*** Belanja Operasi**	**3.821.268.928**	**3.655.548.637**	**95,66**
a) Belanja Pegawai	2.667.030.000	2.518.387.706	94,43
b) Belanja Barang dan Jasa	1.154.238.928	1.137.160.931	98,52
*** Belanja Modal**	**213.841.410**	**212.641.000**	**99,44**

Dari data diatas dapat dirincikan berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Keuangan Belanja

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	(+ / -)	CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4,0	5	6	6
2,0					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**3.720.759.175,0**	**4.035.110.338,0**	**3.868.189.637,0**	**166.920.701,0**	**95,86**
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**3.614.953.503,0**	**3.929.304.666,0**	**3.762.698.072,0**	**166.606.594,0**	**95,76**
2,0	**23,0**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**3.358.008.511,0**	**3.660.459.674,0**	**3.494.244.286,0**	**166.215.388,0**	**95,46**
2,0	23,0	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.409.000,0**	**54.259.000,0**	**54.238.000,0**	**21.000,0**	**99,96**
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.160.000,0	20.010.000,0	20.010.000,0	-	100,00
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000,0	5.400.000,0	5.400.000,0	-	100,00
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	28.849.000,0	28.849.000,0	28.828.000,0	21.000,0	99,93
2,0	23,0	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**2.841.848.837,0**	**2.905.730.000,0**	**2.754.887.706,0**	**150.842.294,0**	**94,81**
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.418.248.837,0	2.490.000.000,0	2.346.337.706,0	143.662.294,0	94,23
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.600.000,0	415.730.000,0	408.550.000,0	7.180.000,0	98,27
								-		
2,0	23,0	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**50.600.000,0**	**50.581.000,0**	**19.000,0**	**99,96**
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny	-	25.600.000,0	25.581.000,0	19.000,0	99,93
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	25.000.000,0	25.000.000,0	-	100,00
2,0	23,0	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**129.500.764,0**	**131.234.764,0**	**131.204.294,0**	**30.470,0**	**99,98**
				02	Penyediaan Peralaan dan Perlengkapan Kantor	67.485.764,0	49.219.764,0	49.190.188,0	29.576,0	99,94
				05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	5.265.000,0	5.265.000,0	5.265.000,0	-	100,00
				08	Fasilitasi Kunjungan tamu	6.750.000,0	6.750.000,0	6.750.000,0	-	100,00
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,0	70.000.000,0	69.999.106,0	894,0	100,00
2,0	23,0	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**65.709.410,0**	**87.259.410,0**	**86.659.000,0**	**600.410,0**	**99,31**
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.709.410,0	87.259.410,0	86.659.000,0	600.410,0	99,31
2,0	23,0	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.870.500,0**	**68.706.500,0**	**62.793.386,0**	**5.913.114,0**	**91,39**
				01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,0	6.586.000,0	6.586.000,0	-	100,00
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.870.500,0	62.120.500,0	56.207.386,0	5.913.114,0	90,48
2,0	23,0	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**197.670.000,0**	**362.670.000,0**	**353.880.900,0**	**8.789.100,0**	**97,58**
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.170.000,0	192.170.000,0	183.980.900,0	8.189.100,0	95,74
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,0	6.500.000,0	6.500.000,0	-	100,00
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.000.000,0	164.000.000,0	163.400.000,0	600.000,0	99,63
2,0	23,0	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**256.944.992,0**	**268.844.992,0**	**268.453.786,0**	**391.206,0**	**99,85**
2,0	23,0	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**226.162.382,0**	**238.062.382,0**	**237.760.286,0**	**302.096,0**	**99,87**
				01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Daerah	36.157.000,0	48.057.000,0	47.978.000,0	79.000,0	99,84
				02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	64.929.706,0	64.929.706,0	64.781.200,0	148.506,0	99,77
				03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah kabupaten/Kota	11.421.800,0	11.421.800,0	11.376.800,0	45.000,0	99,61
				04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30.169.812,0	30.169.812,0	30.153.400,0	16.412,0	99,95
				07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan ingkat Kabupaten/Kota	58.919.800,0	58.919.800,0	58.916.486,0	3.314,0	99,99
				09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	24.564.264,0	24.564.264,0	24.554.400,0	9.864,0	99,96
2,0	23,0	02	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota**	**30.782.610,0**	**30.782.610,0**	**30.693.500,0**	**89.110,0**	**99,71**
				03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.782.610,0	30.782.610,0	30.693.500,0	89.110,0	99,71
2,0	**24,0**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**105.805.672,0**	**105.805.672,0**	**105.491.565,0**	**314.107,0**	**99,70**
2,0	24,0	02	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**62.085.266,0**	**61.785.266,0**	**61.760.159,0**	**25.107,0**	**99,96**
				01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	**28.251.300,0**	**27.951.300,0**	**27.950.800,0**	**500,0**	100,00
				02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	**22.628.300,0**	**22.628.300,0**	**22.613.693,0**	**14.607,0**	99,94
				03	**Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota**	**11.205.666,0**	**11.205.666,0**	**11.195.666,0**	**10.000,0**	99,91
2,0	24,0	02	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**16.153.400,0**	**16.153.400,0**	**16.074.400,0**	**79.000,0**	**99,51**
				02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	16.153.400,0	16.153.400,0	16.074.400,0	79.000,0	99,51
2,0	**24,0**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**27.567.006,0**	**27.867.006,0**	**27.657.006,0**	**210.000,0**	**99,25**
				01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	15.569.200,0	15.869.200,0	15.794.200,0	75.000,0	99,53
				02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	11.997.806,0	11.997.806,0	11.862.806,0	135.000,0	98,87
JUMLAH						**3.720.759.175,0**	**4.035.110.338,0**	**3.868.189.637,0**	**166.920.701,0**	**95,86**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pelaksanaan dari PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya seoptimal mungkin dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada serta dukungan dari seluruh Instansi terkait untuk mencapai Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur diupayakan sebaik mungkin untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kepastian Pelayanan Perpustakaan dalam mengupayakan masyarakat Tanjung Jabung Timur yang cerdas dan terampil dengan peningkatan IPLM dan TGM serta pemanfaatan arsip yang dapat dikelola dengan baik oleh perangkat daerah.

Akhirnya, dengan memahami berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban. Demikian, semoga Allah SWT merahmati dan meridhoi kita semua. Amin.

Muara Sabak, Januari 2023

PENGGUNA ANGGARAN

DEDDY ARMADI, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750615 200012 1 004